

EVALUASI GERAKAN MORAL BERSIH DALAM IMPLEMENTASI GCG DI MIXUE BANYUANYAR SOLO

Magdalena Nany¹, Sabda Wahyudi², Roberto Akyuwen³, Uri Christian Sakti Labeti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Kristen Teknologi Solo

¹magdalenasolotech@gmail.com, ²sabda2000@gmail.com, ³akyuwenroberto@gmail.com,

⁴urichristian.ukts@gmail.com

Abstrak

Good governance is one of the keys to long-term business growth and success. One of the first steps business managers can take in implementing Good Corporate Governance (GCG) is through the Clean, Transparent, and Professional Moral Movement (BTP). As a franchise business that has only been operating for two years, the management of Mixue Banyuanyar Solo urgently needs to enforce the implementation of a clean moral movement that embodies the values of integrity, credibility, honesty, and anti-corruption. Data collection techniques used were interviews and observations. Although there is no specific written ethics policy at the outlet level (such as Banyuanyar Solo), this outlet still upholds ethics and integrity through adherence to central SOPs, routine audits, and controls. Mixue Banyuanyar Solo does not yet have a clear written local policy prohibiting corruption, collusion, and nepotism, but it does have an operationally effective oversight mechanism. Even sophisticated digital monitoring technology still has weaknesses and limitations. Therefore, employees and franchisees with integrity and clean behavior are key pillars that will support Mixue's future success.

Kata Kunci: *good corporate governance, clean moral movement*

Abstract

Tata kelola yang baik merupakan salah satu kunci sukses usaha untuk tumbuh dalam jangka panjang. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh pengelola usaha dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG), adalah melalui Gerakan Moral Bersih Transparan dan Profesional (BTP). Sebagai usaha franchise yang baru beroperasi selama 2 tahun, pengelola Mixue Banyuanyar Solo perlu sekali menegakkan penerapan gerakan moral bersih yang mengandung nilai integritas, kredibilitas, kejujuran dan anti korupsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Meski tidak ada kebijakan etika tertulis khusus di level gerai (seperti Banyuanyar Solo), outlet ini tetap menegakkan etika dan integritas melalui kepatuhan pada SOP pusat, audit dan kontrol rutin. Mixue Banyuanyar Solo belum memiliki kebijakan tertulis lokal yang jelas tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun memiliki mekanisme pengawasan yang efektif secara operasional. Teknologi pengawasan digital secanggih apa pun tetap memiliki kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, karyawan dan franchisee yang berintegritas serta berperilaku bersih merupakan pilar utama yang akan menopang keberhasilan Mixue di masa depan.

Keywords: *tata kelola perusahaan; gerakan moral bersih*

Submitted: 2025-11-30	Revised: 2025-12-07	Accepted: 2025-12-17
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Persaingan global mengharuskan perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN, untuk beroperasi dengan efisiensi dan profesionalisme tinggi guna memenuhi ekspektasi para pemegang saham dan masyarakat. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, perusahaan memerlukan tata kelola yang baik (Simbolon, Muda, & Batubara, 2024). Tata kelola yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dalam jangka panjang. Dengan adanya tata kelola yang baik dalam perusahaan akan dapat menciptakan persaingan bisnis yang sehat. *Good corporate governance* memiliki lima prinsip yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* (Wijaya, 2014). Implementasi prinsip GCG dimaksudkan agar terwujudnya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-halnya sebagai karyawan maupun adanya keterlibatan dari seluruh karyawan dalam pengembangan perusahaan untuk meraih visi dan misi perusahaan. (Maheswari, Murwadi, & Suwandono, 2020).

Survei dari McKinsey menyatakan bahwa investor bersedia untuk membayar lebih dari 16% terhadap saham perusahaan jika diketahui memiliki *Good Corporate Governance* (Sudharmono & Tunjungsari, 2021). Tingkat penerapan GCG berdampak signifikan pada kinerja bisnis UMKM. UMKM yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki kinerja finansial yang lebih stabil dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya finansial (MA, Ningsih, Siregar, & Astri, 2024).

Corporate Governance merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *governance* yang baik dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional (Nuha, Afifa, & Safitri, 2020).

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), adalah melalui Gerakan Moral Bersih Transparan dan Profesional (BTP). Gerakan Moral BTP di perusahaan perlu dilakukan dengan kesadaran dan konsisten, sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan perusahaan dengan langkah terpenuhinya etika bisnis. Nilai dasar (*basic value*) yang terkandung dalam istilah Bersih-Transparan-Profesional, yaitu:

1. Bersih (*clean*), terkandung nilai integritas (*integrity*), kredibilitas (*credibility*), jujur (*honest*), anti Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Segenap jajaran perusahaan diharapkan berperilaku jujur, menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas, serta mempunyai sikap anti KKN.
2. Transparan (*transparency*), terkandung nilai akuntabilitas (*accountability*), bertanggungjawab (*responsibility*), keterbukaan serta *auditable*. Segenap jajaran perusahaan diharapkan dapat berperilaku penuh rasa tanggung jawab, terbuka, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak berwenang.
3. Profesional (*professionalism*), terkandung nilai kepatuhan (*compliance*), kapabilitas (*capability*), dan kemampuan (*competency*). Segenap jajaran perusahaan diharapkan dapat bekerja dengan trampil, teliti, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga perlu memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta berani mengambil risiko untuk mencapai keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal yang tidak kalah penting, adalah adanya kepatuhan seluruh pelaku dalam perusahaan terhadap segala peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku. (Effendi, 2017)

Gerakan moral BTP di perusahaan dilakukan dengan tujuan agar:

1. Terwujudnya *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan.
2. Terbentuknya budaya baru perusahaan (*new corporate culture*) yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
3. Terbangunnya citra perusahaan (*corporate image*) yang baik, di mata *stakeholders*, masyarakat, dan pihak luar perusahaan lainnya.
4. Terhindarnya praktik-praktek KKN yang sangat merugikan perusahaan.

Dalam pedoman Perilaku Etika Perusahaan (*code of corporate conduct/Ethics*), yang ditetapkan oleh Direksi, terkandung nilai-nilai etika/moral yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang terkait dengan Gerakan Moral BTP (Prahastya, Pratama, Nany, Kurniawati, & Wahyudi, 2025).

Gerakan Moral Bersih

1. Tidak melakukan suatu perbuatan tercela. Segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat perbuatan-perbuatan yang melanggar etika / moral, hukum, ketentuan-ketentuan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak melakukan praktek Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Korupsi berarti menyelewengkan atau menggelapkan asset perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain dan merugikan

perusahaan / negara. Kolusi berarti bekerja sama dengan pihak lain, baik secara pribadi atau bersama-sama, untuk mengambil keuntungan dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nepotisme berarti perbuatan yang hanya memberikan keuntungan pada keluarga, teman-teman, kerabat dan seterusnya, yang dapat merugikan perusahaan.

3. Tidak menerima pemberian apapun. Tidak menerima uang, hadiah 860ocus860si pemberian dalam bentuk apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan yang dapat menyebabkan penyimpangan pelaksanaan tugas dan/atau pengambilan keputusan.
4. Selalu bersikap Jujur. Jujur berarti tindakan yang dilakukan sesuai dengan perkataan dan hati nuraninya atau satunya kata dan tindakan (tidak munafik).

Gerakan Moral Transparan

Transparan berarti segala kegiatan yang dilaksanakan, informasi yang dimiliki, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) dan tidak ada yang dirahasiakan. Transparan sangat menuntut kejelasan siapa dan berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Gerakan Moral Profesional

Bersikap profesional berarti memiliki tekad bekerja secara sungguh-sungguh untuk memberikan hasil kerja (kinerja) terbaik dengan mengerahkan segenap kompetensi yang dimiliki secara optimal, yaitu:

1. Memberikan hasil (*output*) yang terbaik. Bekerja secara profesional ditunjukkan dengan ketekunan, ketelitian, kerja keras, disiplin tinggi, serta berusaha memberikan hasil (*output*) yang terbaik bagi perusahaan.
2. Memiliki visi yang jelas dan kompetensi yang memadai. Profesionalisme menuntut segenap karyawan dan pimpinan perusahaan memiliki visi yang jelas dan kompetensi yang memadai. Visi yang jelas akan lebih 860ocus terhadap apa yang dicita-citakan dan kompetensi yang memadai akan mengoptimalkan pekerjaan sehingga dapat memberikan hasil terbaik kepada perusahaan serta dapat memacu kinerjanya.
3. Dapat bekerjasama dalam kelompok (*teamwork*). Kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kesuksesan individual melainkan lebih ditentukan oleh hasil kerja kelompok.
4. Memiliki sikap kreatif dan inovatif. Profesionalisme dapat berkembang secara optimal pada individu yang memiliki sikap kreatif dan inovatif. Yaitu terletak pada mereka yang selalu berusaha mencari cara baru dalam mengatasi berbagai masalah dalam perusahaan (*problem solving*).

Sebenarnya cukup banyak perusahaan yang telah mempraktekkan Bersih Transparan dan Profesional (BTP), hanya saja belum diformalkan dalam suatu keputusan manajemen perusahaan (Nany, Yonivianta, Bepa Tobu, Subroto, & Kuntadi, 2025).

Mixue Banyuanyar Solo terletak di Jl. Adi Sumarmo 223, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta 57137 dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga pukul 22.00 WIB. Mixue Banyuanyar Solo memulai kegiatan operasionalnya pada pertengahan tahun 2023. Mixue Banyuanyar Solo ini termasuk perintis usaha ice cream dan teh dengan harga jual yang terjangkau di daerah Solo. Adapun keunggulan dari Mixue sebagai usaha *franchise* adalah harganya sangat terjangkau, porsi besar, kualitas rasanya konsisten, dan sudah ada beberapa cabang yang beroperasi di Solo. Mixue memiliki banyak varian minuman segar, mulai dari es krim, *milk tea*, *fruit tea*, *smoothies* dan kopi dengan harga jual yang bervariasi dari Rp. 8.000 hingga Rp. 24.000. Manajemen Mixue berfokus pada strategi waralaba mandiri dengan *supply chain* terpusat, harga terjangkau dan ekspansi cepat, di mana mereka menyediakan bahan baku dan peralatan, sementara *franchisee* mengelola operasional harian. Agar pengelolaan operasional harian optimal

perlu sekali bagi *franchisee* untuk membiasakan penerapan gerakan moral bersih yang mengandung nilai integritas, kredibilitas, kejujuran dan anti korupsi. Tata kelola perusahaan yang baik sebaiknya mulai diberlakukan ketika usaha mulai berjalan, agar ketika usaha berkembang pesat *franchisee* dan karyawan telah terbiasa dengan gerakan moral bersih.

Metode

Pengabdian Masyarakat ini bersifat deskriptif dalam menganalisa penerapan gerakan moral bersih di Gerai es teh Atlas. Pemilihan studi ini dikarenakan Pengabdian Masyarakat kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan interaksi dengan informan dan juga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam. Desain ini cocok untuk menggali informasi informasi yang melatar belakangi perilaku tertentu dan pendapat informan mengenai masalah tertentu.

Dalam Pengabdian Masyarakat ini peneliti ingin mengamati dan mengkaji data-data faktual tentang gambaran proses penerapan gerakan moral bersih yang terjadi di lapangan, kemudian mendeskripsikan hasil temuan di lapangan kedalam bentuk tulisan. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengambil data dalam suasana yang wajar dan tanpa manipulasi/merekayasa sesuai situasi, sehingga data yang diperoleh akan memenuhi validasi data yang diperlukan. Upaya untuk memperoleh data yang valid dilakukan dengan menggali informasi setuntas mungkin dan mengambil data sesuai fokus kajian. Pelaporan data disusun dalam bentuk deskriptif kemudian peneliti menarik kesimpulan (Sundari, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak *franchisee* :

1. Apakah organisasi memiliki kebijakan yang jelas tentang etika dan integritas?

Jawaban : Mixue sebagai brand (*franchisor*) memang memiliki kerangka kebijakan etika dan integritas secara umum — termasuk prinsip anti-korupsi dan *compliance* di tingkat pusat. Gerai spesifik seperti Mixue Banyuwangi Solo tidak memiliki kebijakan tertulis yang tersedia untuk publik atau berbeda secara resmi dari kebijakan pusat.

2. Bagaimana cara organisasi memastikan bahwa semua anggota mematuhi standar etika dan integritas?

Jawaban : Meski tidak ada kebijakan etika tertulis khusus di level gerai (seperti Banyuwangi Solo), outlet ini tetap menegakkan etika dan integritas melalui kepatuhan pada SOP pusat, audit dan kontrol rutin, pengawasan digital, pelatihan karyawan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

3. Bagaimana organisasi menangani pelanggaran etika atau integritas?

Jawaban : Mixue Banyuwangi Solo menangani pelanggaran etika melalui investigasi internal oleh supervisor/owner, analisis bukti digital (CCTV, POS, stok), penerapan sanksi bertingkat, pelaporan ke pusat untuk pelanggaran serius, pelatihan ulang dan perbaikan SOP

4. Apakah organisasi memberikan contoh yang baik dalam hal integritas, baik di level manajerial maupun operasional?

Jawaban : Berdasarkan praktik operasional standar Mixue yang diterapkan di semua gerai, Mixue Banyuwangi Solo memberikan contoh yang baik dalam hal integritas, baik di tingkat manajemen maupun operasional, melalui: kepatuhan terhadap SOP pusat, keteladanan

manajerial, konsistensi kualitas produk dan layanan, pengawasan internal yang ketat, serta budaya kerja yang disiplin dan transparan.

5. Apakah organisasi memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat dibuktikan dalam memenuhi komitmen dan janjinya?

Jawaban : Berdasarkan indikator yang dapat diamati dari operasional gerai Mixue pada umumnya, outlet ini dapat dianggap memiliki rekam jejak yang stabil, konsisten, bebas dari isu publik, tetap memenuhi standar pusat, dan mampu menjaga kepercayaan pelanggan. Dengan demikian, meskipun bukti formal tidak tersedia secara terbuka, rekam jejak operasionalnya dapat dinilai cukup baik dan dapat dibuktikan melalui keberlanjutan dan konsistensi operasional.

6. Bagaimana organisasi menjaga kualitas produk atau layanan yang ditawarkan?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo menjaga kualitas produk dan layanan melalui penerapan SOP pusat, penggunaan bahan baku resmi, pelatihan rutin karyawan, pengawasan harian supervisor/owner, audit dari pusat, monitoring digital dan perawatan mesin yang terjadwal. Mekanisme ini adalah standar nasional Mixue, dan diterapkan secara konsisten di Banyuanyar Solo.

7. Apakah organisasi transparan dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan?

Jawaban : Meskipun Mixue Banyuanyar Solo tidak memiliki laporan transparansi formal yang dipublikasikan untuk umum, outlet ini dapat dikatakan transparan dalam konteks operasional waralaba, khususnya karena:

- a. Melaporkan data penjualan dan stok secara jujur kepada pusat.
- b. Menyampaikan informasi operasional dengan jelas kepada karyawan
- c. Memberikan informasi produk yang transparan kepada pelanggan.

Dengan demikian, tingkat transparansinya dapat dinilai memadai sesuai standar franchise Mixue.

8. Apakah organisasi memiliki sertifikasi, akreditasi, atau penghargaan yang diakui dalam industri atau sektor terkait?

Jawaban : Mixue telah memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama pada tanggal 16 Februari 2023 sehingga seluruh bahan dan proses produksi produk Mixue telah memenuhi standar halal.

9. Apakah organisasi memiliki mekanisme untuk menangani keluhan atau masalah yang timbul dari pelanggan atau mitra?

Jawaban : Ya, Mixue memiliki mekanisme untuk menangani keluhan atau masalah baik dari pelanggan maupun mitra, melalui:

- a. Penanganan langsung di outlet oleh staf dan supervisor.
- b. Sistem komunikasi pusat melalui media sosial dan kontak resmi.
- c. Audit dan pengawasan jika masalah bersifat serius.
- d. Mekanisme formal untuk franchisee, berdasarkan kontrak waralaba.
- e. Koordinasi dengan distributor atau pemasok untuk keluhan rantai pasok

10. Apakah organisasi mendorong budaya keterbukaan dalam berkomunikasi?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo mendorong budaya keterbukaan dalam berkomunikasi, baik di tingkat manajerial, operasional, maupun eksternal kepada pelanggan, melalui:

- a. Arahan dan briefing rutin dari manajemen.

- b. Saluran internal terbuka untuk menyampaikan kendala atau masalah operasional.
- c. Penanganan keluhan pelanggan secara transparan.
- d. Tidak adanya indikasi praktik menutup informasi.

Dengan demikian, praktik komunikasi di gerai ini mendukung terciptanya budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap masalah.

11. Apakah organisasi secara terbuka mengakui kesalahan atau kegagalan yang terjadi?

Jawaban : Mixue, termasuk gerai seperti Banyuanyar Solo, mengakui kesalahan dan kegagalan terutama dalam konteks internal dan operasional melalui:

- a. Pengakuan langsung kepada pelanggan ketika terjadi kesalahan produk atau layanan.
- b. Evaluasi internal oleh manajemen untuk memperbaiki prosedur dan SOP.
- c. Tindakan korektif dari pusat bagi masalah yang lebih serius.

Namun, pengakuan ini bersifat internal dan operasional, bukan dalam bentuk publikasi atau pengumuman resmi kepada masyarakat luas. Dengan demikian, Mixue menunjukkan

12. Apakah organisasi menyediakan saluran yang aman dan terjamin kerahasiaannya bagi karyawan untuk melaporkan ketidakjujuran atau pelanggaran etika?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo menyediakan beberapa saluran bagi karyawan untuk melaporkan ketidakjujuran atau pelanggaran etika, baik secara:

- a. Formal – melalui supervisor/owner dan laporan ke pusat.
- b. Informal – komunikasi langsung atau pesan pribadi.

13. Apakah pimpinan organisasi memberikan contoh kejujuran dalam tindakan dan komunikasi mereka sehari-hari?

Jawaban : Owner atau pimpinan Mixue Banyuanyar Solo memberikan contoh kejujuran dalam tindakan dan komunikasi sehari-hari, melalui :

- a. Kepatuhan terhadap SOP pusat dan standar operasional.
- b. Transparansi dan kejelasan dalam komunikasi dengan karyawan.
- c. Penanganan keluhan pelanggan dengan jujur.
- d. Penegakan sanksi yang adil dan konsisten.

Dengan demikian, pimpinan gerai berperan sebagai teladan kejujuran yang mendorong budaya integritas di tingkat operasional.

14. Apakah organisasi memiliki kebijakan tertulis yang jelas mengenai larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo belum memiliki kebijakan tertulis lokal yang jelas tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun, prinsip integritas dan pencegahan perilaku tidak etis tetap ditegakkan melalui:

- a. SOP pusat yang mengatur kejujuran dan disiplin operasional.
- b. Audit dan pengawasan berkala.
- c. Penerapan sanksi bagi pelanggaran SOP.

15. Apakah organisasi memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo memiliki mekanisme pengawasan yang efektif secara operasional, melalui:

- a. SOP pusat yang mengatur prosedur dan integritas operasional.
- b. Monitoring digital transaksi dan stok.
- c. Pengawasan internal oleh owner dan supervisor.
- d. Audit berkala dari pusat waralaba.

Namun, sistem ini lebih bersifat pencegahan dan pengawasan operasional, dan efektivitasnya tetap bergantung pada integritas personel

16. Sejauh mana organisasi memastikan bahwa pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan anggaran atau sumber daya, dilakukan secara transparan dan akuntabel?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo memastikan pengambilan keputusan terkait anggaran dan sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui:

- a. Pengawasan rutin oleh owner dan supervisor.
 - b. Pencatatan digital yang terperinci.
 - c. Pedoman SOP pusat sebagai standar keputusan.
 - d. Audit dan evaluasi berkala oleh pusat waralaba.
17. Apakah proses rekrutmen dan promosi di dalam organisasi dilakukan secara objektif dan bebas dari nepotisme?

Jawaban : Proses rekrutmen dan promosi di Mixue Banyuanyar Solo umumnya dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan kepatuhan terhadap SOP. Meskipun belum ada kebijakan tertulis anti-nepotisme, praktik operasional sehari-hari menunjukkan keputusan rekrutmen dan promosi bebas dari pengaruh hubungan pribadi, dengan integritas owner dan supervisor sebagai faktor penentu utama.

18. Apakah pimpinan organisasi memberikan contoh yang baik dalam hal menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme?

Jawaban : Pimpinan Mixue Banyuanyar Solo memberikan contoh yang baik dalam menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui:

- a. Kepatuhan terhadap SOP pusat dan prosedur operasional.
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
 - c. Penegakan disiplin dan evaluasi kinerja secara adil.
 - d. Tindakan yang konsisten dalam mengakui kesalahan dan memperbaiki masalah.
- Dengan demikian, pimpinan gerai berperan sebagai teladan integritas bagi seluruh staf operasional.
19. Apa jenis tindakan yang diambil oleh organisasi terhadap individu yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo menindak individu yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme melalui:

- a. Pemberian sanksi internal sesuai tingkat pelanggaran.
- b. Evaluasi dan pelatihan ulang untuk mencegah kesalahan berulang.
- c. Pengawasan tambahan serta audit berkala dari pusat waralaba.

Tindakan ini menegaskan komitmen gerai terhadap integritas dan kepatuhan terhadap SOP pusat, meskipun efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan oleh pimpinan lokal.

20. Bagaimana organisasi berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, mitra bisnis, atau pemasok, dalam hal pengelolaan kontrak dan transaksi?

Jawaban : Mixue Banyuanyar Solo berinteraksi dengan pihak eksternal—pemerintah, mitra bisnis, dan pemasok—dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada prosedur formal, melalui:

- Pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
- Pengelolaan kontrak formal dengan mitra bisnis.
- Transaksi bahan baku melalui distributor resmi dan prosedur pembelian yang terdokumentasi.
- Audit internal dan pengawasan rutin untuk memastikan integritas dan kepatuhan.

Dengan demikian, interaksi eksternal gerai dilakukan secara profesional dan terkontrol, mendukung reputasi dan keberlanjutan operasional.



Gambar 1. Gerai Mixue Banyuanyar Solo



Gambar 2. Suasana Gerai Mixue Banyuanyar Solo

Kesimpulan

Mixue sebagai brand (*franchisor*) memang memiliki kerangka kebijakan etika dan integritas secara umum — termasuk prinsip anti-korupsi dan *compliance* di tingkat pusat. Meski tidak ada kebijakan etika tertulis khusus di level gerai (seperti Banyuanyar Solo), outlet ini tetap menegakkan etika dan integritas melalui kepatuhan pada SOP pusat, audit dan kontrol rutin. Mixue Banyuanyar Solo menangani pelanggaran etika melalui investigasi internal oleh supervisor/owner. Mixue Banyuanyar Solo memberikan contoh yang baik dalam hal integritas, baik di tingkat manajemen maupun operasional, melalui: kepatuhan terhadap SOP pusat, keteladanan manajerial, konsistensi kualitas produk dan layanan. Outlet ini dapat dianggap memiliki rekam jejak yang stabil, konsisten, bebas dari isu publik, tetap memenuhi standar pusat, dan mampu menjaga kepercayaan pelanggan. (rating googlenya 4,9)

Mixue Banyuanyar Solo menjaga kualitas produk dan layanan melalui penerapan SOP pusat, penggunaan bahan baku resmi, pelatihan rutin karyawan. Meskipun Mixue Banyuanyar Solo tidak memiliki laporan transparansi formal yang dipublikasikan untuk umum, outlet ini dapat dikatakan transparan dalam konteks operasional waralaba. Mixue telah memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama pada tanggal 16 Februari 2023 sehingga seluruh bahan dan proses produksi produk Mixue telah memenuhi standar halal. Mixue memiliki mekanisme untuk menangani keluhan atau masalah baik dari pelanggan maupun mitra. Mixue Banyuanyar Solo mendorong budaya keterbukaan dalam berkomunikasi, baik di tingkat manajerial, operasional, maupun eksternal kepada pelanggan.

Mixue, termasuk gerai seperti Banyuanyar Solo, mengakui kesalahan dan kegagalan terutama dalam konteks internal dan operasional. Mixue Banyuanyar Solo menyediakan beberapa saluran bagi karyawan untuk melaporkan ketidakjujuran atau pelanggaran etika. Owner atau pimpinan Mixue Banyuanyar Solo memberikan contoh kejujuran dalam tindakan dan komunikasi sehari-hari. Mixue Banyuanyar Solo belum memiliki kebijakan tertulis lokal yang jelas tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mixue Banyuanyar Solo memiliki mekanisme pengawasan yang efektif secara operasional.

Mixue Banyuanyar Solo memastikan pengambilan keputusan terkait anggaran dan sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses rekrutmen dan promosi di Mixue Banyuanyar Solo umumnya dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan kepatuhan terhadap SOP. Pimpinan Mixue Banyuanyar Solo memberikan contoh yang baik dalam menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mixue Banyuanyar Solo menindak individu yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme. Mixue Banyuanyar Solo berinteraksi dengan pihak eksternal—pemerintah, mitra bisnis, dan pemasok—dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada prosedur formal.

Daftar Pustaka

- Effendi, M. (2017). *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- MA, M., Ningsih, N., Siregar, R., & Astri, Y. (2024). Analisis Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada UMKM di Kota Medan. *Kampus Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 226-235.
- Maheswari, A., Murwadi, T., & Suwandono, A. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) . *Hermeneutika*, 27-36.

- Nany, M., Yonivianta, S. J., Bepa Tobu, O. G., Subroto, A. S., & Kuntadi, Y. A. (2025). Evaluasi Gerakan Moral Bersih dalam Implementasi GCG di Kedai Es Krim Aice Masjid Zayed Solo. *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1-10.
- Nuha, M., Afifa, S., & Safitri, K. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance P.T. Asuransi Purna Artanugraha. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 113-119.
- Prahastya, C. K., Pratama, T. A., Nany, M., Kurniawati, M. E., & Wahyudi, S. (2025). Evaluasi Gerakan Moral Bersih dalam Implementasi GCG di Gerai Es TEh Atlas Gondang Sragen Menurut Pandangan Kristiani. *Jurdian Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan*, 5(1), 64-74.
- Simbolon, L., Muda, I., & Batubara, B. (2024). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada P.T. Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 102-110.
- Sudharmono, J., & Tunjungsari, H. (2021). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance pada P.T. BUMN ABC, Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 225-234.
- Sundari, H. (2014). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance pada Bank PD BPR Sarimadu. *Jurnal SOROT*, 43-58.
- Wijaya, D. (2014). Penerapan Prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness pada Perusahaan Keluarga P.T. Gunawan Jaya di Probolinggo-Jawa Timur. *Agora*, 1-8.